

BAB IV

KEBIJAKAN MONETER MENURUT M. UMER CHAPRA

A. Strategi Kebijakan Moneter M. Umer Chapra

Secara prinsip dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islam menurut M.Umer Chapra berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return* (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya.

Menurut M. Umar Chapra dalam perekonomian Islam, permintaan akan uang terutama muncul dari transaksi dan kebutuhan yang kebanyakan ditentukan oleh tingkat pendapatan dan distribusinya. Permintaan spekulatif akan uang pada dasarnya dipicu oleh fluktuasi tingkat bunga dalam perekonomian kapitalis. Penurunan tingkat bunga yang disertai dengan harapan yang akan meningkat merangsang orang ataupun perusahaan-perusahaan untuk tetap menyimpan uangnya.

Dalam sebuah perekonomian Islam, permintaan terhadap uang akan lahir terutama motif dari transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan uang dan distribusinya.¹ Permintaan terhadap uang

¹Makin merata distribusi pendapatan, makin besar permintaan akan uang tingkatan pendapatan agregat tertentu. Lihat David Laidler, *The Demand for Money Theories and Evidence* (Bombay: Allied Publisher, 1972), h.66

karena motif spekulatif pada dasarnya didorong oleh fluktuasi suku bunga pada perekonomian kapitalis. Suatu penurunan dalam suku bunga dibarengi dengan harapan tentang kenaikannya akan mendorong individu dan dibarengi dengan harapan tentang kenaikannya akan mendorong individu dan perusahaan akan meningkatkan jumlah uang yang dipegang. Karena suku bunga seringkali berfluktuasi pada perekonomian kapitalis. Karena dalam perekonomian kapitalis tingkat bunga seringkali berfluktuasi, uang yang sengaja hanya disimpan akan terus menerus berubah. Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat sebesar 2,5 % setahun tidak hanya dapat meminimalisasikan permintaan spekulatif akan uang maupun penyimpanan uang yang diakibatkan oleh tingkat bunga diatas, melainkan juga memberi stabilitas yang lebih tinggi terhadap permintaan akan uang. Hal ini diperkuat dengan sejumlah faktor termasuk:

1. Tidak adanya bunga dalam perekonomian Islam menghadapkan pemilik modal pilihan tidak mau mengambil resiko dan tetap mempertahankan uangnya dalam bentuk tunai tanpa imbalan atau menempuh resiko yang telah diperhitungkan terlebih dahulu dan menginvestasikannya dalam bentuk kerjasama bagi hasil dengan beberapa imbalan.
2. Akan tersedia peluang-peluang investasi jangka pendek ataupun jangka panjang kepada semua investor kecil maupun besar yang mau mengambil resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya.
3. Dengan ini para investor lebih berhati-hati dalam penggunaan uang.
4. Tingkat keuntungan tidak seperti halnya tingkat bunga, tidak akan ditentukan terlebih dahulu, satu-satunya hal yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah perbandingan resiko laba-rugi (*profit sharing ratio*) dan tidak

akan berfluktuasi sebagaimana yang terjadi dengan bunga. Kalaupun ada perubahan biasanya ini akan terjadi setelah adanya tekanan dari pasar dan itupun setelah proses negoisasi yang panjang. Jika prospek ekonomi membaik, keuntungan dengan sendirinya akan naik, dengan demikian tidak ada sesuatu yang diperoleh dengan menunggu.²

Preferensi likuiditas yang muncul dari motif spekulatif oleh karenanya tidak penting dalam perekonomian Islam. Sehingga variabel yang harus diformulasikan dalam perekonomian Islam adalah stok uang bukan tingkat suku bunga. Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga yang stabil dan tujuan-tujuan sosio ekonomi Islam. Sasarannya haruslah untuk menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum. Tingkat pertumbuhan yang ingin dicapai adalah stabil, realistis dan dapat bertahan dalam jangka menengah dan panjang bukan yang realistis naik dan turun.

Meskipun strategi di atas tidak mengakui segi penting pengaturan pertumbuhan uang dalam manajemen perekonomian yang sukses bukan berarti bahwa ini mencerminkan pendekatan moneter yang sederhana dan komitmen terhadap ideologinya. Tidak ada anggapan yang mengatakan bahwa kekuatan pasar saja dapat menghasilkan *non inflationary*, melenyapkan pengangguran,

² Chapra, *al-Qur'an*, h. 167

mengurangi kerugian dan memperjelas pemahaman akan tujuan-tujuan lain jika pertumbuhan uang diatur secara memadai.

Sesungguhnya perlu ditekankan bahwa untuk mewujudkan tujuan-tujuan Islam sepenuhnya bukan hanya pembaharuan ekonomi berdasarkan ajaran-ajaran Islam tidak dapat dihindari tetapi perlu juga bagi pemerintah untuk memainkan peranan positif dan semua kebijakn pemerintah termasuk fiskal, moneter dan pendapatan harus menuju arah yang sama. Praktek-paraktek kapitalistik harus ditekan dan perlu dilakukan segala upaya untuk menghilangkan kekakuan struktural dan mendorong semua faktor yang mampu meningkatkan barang-barang pokok dan jasa agar dapat memainkan peranan yang semestinya.

Sistem keuangan hadir untuk memberikan berbagai macam jasa keuangan yang dapat diterima secara religius kepada komunitas-komunitas muslim. Selain fungsi khusus ini, institusi-institusi perbankan dan keuangan, sebagaimana aspek-aspek masyarakat Islam lainnya, diharapkan memberikan kontrinbusi secara pantas kepada pencapaian tujuan-tujuan sosio-ekonomi Islam yang utama. Yang terpenting dari semua ini adalah kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang wajar, stabilitas mata uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi-hasil) kepada semua pihak yang terlibat. Barang kali dimensi religius haruslah dikemukakan sebagai tujuan selanjutnya yang jelas, dalam arti bahwa peluang untuk melakukan ope-rasi-

operasi keuangan yang sah secara agama mempunyai nilai jauh melampaui nilai model operasi keuangan itu sendiri.

Bab ini akan menjelaskan *setting* struktur keuangan Islam model Chapra. Namun kita terlebih dahulu membicarakan sasaran dan strategi dalam rangka membangun struktur ideal dari sistem keuangan Islami. Sistem perbankan dan uang, seperti aspek-aspek kehidupan Islam lainnya, harus direkayasa untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran utama sosio-ekonomi Islam. Sistem ini juga harus terus melaksanakan fungsi utamanya yang berkaitan dengan bidangnya yang khusus dan yang seperti sistem perbankan lainnya berfungsi. Sasaran itu antara lain:

1. Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal.
2. Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata.
3. Stabilitas nilai mata uang untuk memungkinkan alat tukar sebagai satuan unit yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran yang ditanggungkan, dan alat penyimpan nilai yang stabil.
4. Mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan.
5. Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan.

Barangkali dapat diutarakan bahwa sasaran dan fungsi sistem uang dan perbankan Islam sama dengan yang berlaku dalam kapitalisme. Meskipun banyak kemiripan, tetapi ada perbedaan yang cukup signifikan dalam penekanan, yang terjadi karena disvergensi dalam komitmen kepada nilai-nilai spiritual, keadilan sosioekonomi, dan persaudaraan kemanusiaan. Sasaran-sasaran dalam Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ideologi dan keimanan. Akan tetapi, strategilah yang sangat penting untuk merealisasikan sasaran-sasaran dan di sinilah Islam memiliki kontribusi unik.

Chapra mengajukan sebuah sistem yang meliputi beberapa institusi berikut: bank sentral, bank komersial, institusi keuangan non-bank, institusi kredit khusus, korporasi asuransi deposito, dan korporasi audit investasi. Meskipun di permukaan struktur ini nampak sama saja dengan struktur untuk keuangan konvensional, Chapra melihat bahwa ada beberapa perbedaan dalam fungsi, skop, dan tanggung jawab dari institusi terkait. Masing-masing institusi dianggap sebagai komponen integritas sistem yang esensial dan, dengan demikian, perlu untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam bab ini.

Bank sentral harus melaksanakan semua fungsi yang sama seperti bank-bank sentral lainnya, yaitu menerbitkan mata uang (*currency*), bertindak sebagai pemberi pinjaman dari usaha terakhir, dan membimbing, menyelia, serta meregulasi sistem keuangan. Tidak seperti bank-bank sentral konvensional, bagaimanapun versi Islam harus juga bertindak mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan kelompok yang punya kepentingan melalui

institusi-institusi keuangan. Tujuan sosial ekonomi ini, bersama dengan tanggung jawab penyeliaan yang sangat komprehensif dan fungsi sentralnya untuk mempromosikan Islam, membedakan bank sentral dari imbangannya yang konvensional.

Bank komersial Islam berbeda dengan bank-bank komersial tradisional dalam dua hal. Perbedaan yang pertama dan paling signifikan adalah penghapusan riba. Pada gilirannya, pelarangan ini akan memaksa bank untuk menggunakan metode-metode operasi baru yang didasarkan terutama pada aransemen *profit-and-loss sharing* (PLS). Perbedaan utama kedua adalah bahwa dana yang berasal dari masyarakat harus digunakan untuk melayani kepentingan umum dan bukan kepentingan individu. Dengan demikian, transaksi-transaksi perbankan tidak boleh semata-mata *profit-oriented*, tetapi sebaliknya ditujukan untuk kebutuhan masyarakat Islam secara keseluruhan. Dalam rangka mencapai sasaran ini, maka bank Islam akan lebih cenderung menjadi bank universal atau bank serba guna (*multi-purpose*) daripada bank komersial murni: ‘turunan silang antara bank komersial dan bank investasi, perwakilan investasi, dan institusi manajemen investasi.

Intermediator keuangan non bank terdiri atas perwakilan investasi dan dana investasi (*investment trust and fund*), koperasi simpan pinjam (*credit union*), institusi manajemen investasi lainnya, dan perusahaan asuransi. Tujuan intermedator-intermedator itu adalah melengkapi bank-bank komersial dan menggalang dana melalui partisipasi ekuitas (modal) simpanan bagi-hasil untuk tujuan-tujuan inves-tasi. Institusi-institusi ini masing-masing dibedakan sesuai

dengan sifat aktivitas pendanaan yang dilakukan serta, konsekuensinya, sesuai dengan masa berakhir-nya dana. Selain dari menggalang dana, para intermediasor ini membantu me-nyebarkan minat bisnis dan mengurangi konsentrasi kekayaan.

Proyek-proyek dan sektor-sektor perekonomian itu yang mungkin saja tidak menarik bagi bank-bank komersial atau institusi-institusi yang bermotif laba lainnya, namun tetap saja penting dilihat dari perspektif komunal yang lebih luas, akan didanai oleh institusi-institusi pemberi kredit khusus. Target operasi mereka meliputi para petani, pekerja tangan ahli, dan usaha atau perusahaan kecil lainnya. Dana untuk tujuan ini dapat diarahkan lewat institusi-institusi khusus dari bank sentral atau pemerintah, dan disalurkan dengan cara yang tidak terpe-ngaruh oleh inflasi seraya mengadopsi praktik-praktik yang digunakan dalam pembangunan standar. Dana jaminan deposito dan korporasi audit investasi adalah organisasi-organisasi dukungan pemerintah yang didirikan untuk menjamin deposito atas unjuk (*demand deposit/ giro*) dalam bank komersial dan untuk melindungi kepentingan para investor bagi-hasil dan para pemegang modal. Tidak ada yang sama dengan korporasi audit investasi dalam perbankan Barat karena pentingnya prinsip PLS dalam pendanaan Islami, dan fungsi *auditing* itu sangat diperlukan tidak hanya untuk keselamatan tetapi juga untuk memenuhi fungsi penting dalam integritas sistem keuangan. Karena alasan-alasan inilah maka proses *auditing*, yang melampaui prinsip-prinsip *auditing* konvensional di Barat, harus sampai pada mempertimbangkan proyek-proyek investasi dan kean-dalan dari praktik manajemen, sehingga menjamin adanya pembagian peng-hasilan yang layak di antara para pemegang saham dan para deposan bagi hasil.

B. Sumber Pengembangan Moneter M.Umer Chapra

Untuk menjamin bahwa suatu pertumbuhan moneter itu “cukup” tetapi tidak berlebihan, kiranya penting untuk memonitor secara berhati-hati ketiga sumber pengembangan moneter. Dua di antaranya bersifat domestik yaitu, satu, pembiayaan defisit negara dengan meminjam dari bank sentral dan kedua, pengembangan deposit dengan cara menciptakan bank-bank kredit komersial. Sumber ketiga bersifat eksternal, berupa moneterisasi *balance of payments surplus*.

1. Defisit Fiskal

Kalanagan ekonom sepakat bahwa defisit fiskal daapt atau bahkan mungkin sudah menjadi sumber pengembangan moneter yang berlebihan. Berbagai langkah pemerintah untuk menggali sector riil dengan tingkat kecepatan yang melebihi stabilitas harga yang dapat dicapai dapat mendorong defisit fiskal yang berkelanjutan dengan memacu penawaran uang sehingga pada gilirannya, menyebabkan inflasi. Bahkan, di negara-negara industri utama, besarnya defisit fiskal telah menjadi penyebab utama kegagalan untuk memenuhi target penawaran uang. Ini cenderung memeberikan beban yang tidak proporsioanal kepada kebijakan moneter dalam rangka memerangi inflasi. Meskipun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh EAGRS (Economic Advisory Group Businees Research Study) “semakin besar tingkat ketergantungan sektor pemerintah terhadap system perbankan, semakin berat bagi bank sentral untuk menjalankan kebijakan moneter yang konsisten”.

Dengan demikian kecuali jika menginginkan agar kebijakan moneter tidak efektif dalam rangka mencapai tujuan nasional kiranya kordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang realistic dan non-inflationory di masyarakat Islam. Oleh karena itu, pemerintah Islam yang benar-benar ingin mewujudkan tujuan-tujuan perekonomian Islam harus menjalankan suatu kebijakan fiskal yang konsisten dengan tujuan-tujuannya. Ini lebih penting karena umumnya pasar uang di masyarakat Islam relative terbelakang sementara kebijaksanaan moneter masih efektif dalam mengatur uang sebagaimana yang dapat dilakukan oleh kebijakan fiskal. Ini bukan berarti menafikan defisit fiskal melainkan menegaskan bahwa defisit tetap dimungkinkan sejauh diperlukan guna pertumbuhan jangka panjang yang stabil dan kemakmuran umat manusia dal kerangka harga yang stabil.

2. Penciptaan Kredit Bank Komersial

Deposito bank komersial merupakan bagian penting dari penawaran uang sebagai kemudahan untuk analisis, dopositi ini dapat dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, “*deposito primer*” yang menyediakan sitem perbankan dengan basis uang (uang kontan dalam bentuk bank + deposito di bank sentral). *Kedua*, “*deposito variatif*” yang dalam sebuah sistem cadangan proporsional mewakili uang yang diciptakan oleh bank komersial dalm proses perluasan kredit dan merupakan sumber utama ekspansi moneter dalam perekonomian dengan kebiasaan perbankan yang sudah maju. Depositi derivatif demikian akan menimbulkan suatu peningkatan penawaran uang, seperti halnya mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral. Karena ekspansi ini persis seperti

defisit pemerintah, memiliki potensi inflasioner jika tidak ada pertumbuhan pengganti dalam output, ekspansi dalam deposito derivatif harus diatur jika pertumbuhan moneter yang diinginkan harus dicapai. Hal ini dapat direalisasikan dengan mengatur ketersediaan uang basis bagi bank-bank komersial. Untuk tujuan ini, ketiadaan bunga sebagai mekanisme pengatur akan berguna. Sebenarnya, ia akan berguna karena akan menghapus efek yang akan menimbulkan ketidakstabilan suku bunga yang berfluktuasi, akan menstabilkan permintaan terhadap uang dan secara substansial mengurangi amplitud fluktuasi ekonomi.

3. Surplus Neraca Pembayaran

Hanya sebagian kecil negara-negara muslim menikmati surplus neraca pembayaran, sedangkan bagian besar dari mereka mengalami defisit. Mereka yang mengalami surplus, surplus tidak akan terjadi dalam sektor swasta dan tidak akan menyebabkan suatu ekspansi otomatis dalam penawaran uang. Ini terjadi hanya karena pemerintah menguangkan surplus dengan membelanjakannya secara domestik, sedangkan defisit neraca pembayaran sektor swasta tidak menggantikan ini secara memadai, dengan suatu negara dengan suatu surplus, pengeluaran pemerintah diatur menurut kapasitas ekonomi untuk menghasilkan penawaran yang riil, seharusnya tidak ada inflasi yang dihasilkan secara internal sebagai akibat dari adanya surplus neraca pembayaran.

Di negara-negara yang mengalami defisit, sumber utama defisit berasal dari ekspansi moneter yang tidak sehat dibarengi dengan konsumsi mencolok dari sektor swasta dan pemerintah melalui defisit transaksi berjalan dan kebocoran modal “bawah tanah”. Hal ini dapat dihapuskan tanpa refoemasi sosio ekonomi

pada tingkat yang lebih dalam dan kebijakan fiskal maupun moneter sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

C. Instrumen Kebijakan Moneter

Dalam kerangka strategi yang telah disebutkan oleh M.Umar Chapra di atas, kiranya dapat disarankan mekanisme bagi kebijakan moneter yang tidak hanya membantu pengaturan penawaran uang sesuai dengan permintaan riil tapi juga membantu memenuhi kebutuhan untuk menutup defisit asli pemerintah dan sekaligus mencapai tujuan-tujuan masyarakat Islam. Mekanisme yang ditawarkan oleh M.Umar Chapra adalah³:

a. Target Pertumbuhan M dan M_0

Secara berkala bank sentral harus menetapkan pertumbuhan penawaran uang (M) sesuai dengan sasaran ekonomi nasional termasuk pertumbuhan ekonomi yang dapat dipertahankan dan stabilitas nilai uang. Target pertumbuhan pada (M) ini harus selalu ditinjau kembali per kuartal, atau sesering mungkin sesuai dengan keadaan ekonmomi kecendrungan variabel-variabel tertentu. Ini karena pentargetan moneter beranggapan bahwa kecepatan income menurut waktu tertentu dapat diperkirakan. Meskipun ini, sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya, dapat diharapkan seperti itu dalam perekonomian Islam pasca penghapusan bunga dan setelah menerapkan sejumlah saran pembaharuan, target tersebut masih tetap perlu dikaji ulang secara terus-menerus.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa target ini harus diubah terlalu sering kecuali sekedar disesuaikan guna mengakomodir guncangan-guncangan

³ *Ibid* h.173

ekonomi domestik maupun internal. Karena sudah diketahui bahwa pertumbuhan pada (M) sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan pada M_0 atau high powered money, bank sentral harus mengawasi secara ketat pertumbuhan M_0 . Tentu hal ini memerlukan kebijakan fiskal yang mempunyai tujuan tertentu dan pengaturan yang memadai bagi akses lembaga-lembaga keuangan pada bank sentral. Sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya, adanya kebijakan fiskal yang dapat dipertanggung jawabkan itu penting untuk memenuhi target-target moneter. Tentunya tidak terkecuali bagi masyarakat Islam yang umumnya peranan kebijakan moneter hanya terbatas karena kurang adanya pasar uang yang terorganisir dengan baik.

Karena M_0 sengaja diciptakan atas kekuasaan bank sentral untuk menciptakan uang, hasil yang diperoleh dari kebijakan ini juga harus semata-mata dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan Islam. Hasil ini terutama harus dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek yang akan membantu mewujudkan cita-cita Islam mengenai Ummah, suatu kesatuan persaudaraan yang tidak terpisahkan oleh kesenjangan pendapatan dan ketidakmerataan kesejahteraan. M_0 yang disediakan untuk bank-bank komersial, terutama dalam bentuk pinjaman *mudharabah*, harus digunakan oleh bank sentral sebagai instrumen kualitatif maupun kuantitatif utama untuk mengendalikan kredit.

Sebagian dari M_0 yang disediakan bagi lembaga-lembaga kredit khusus juga harus berbentuk pinjaman *mudharabah*. Ini terutama hanya disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan produktif, seperti petani, wiraswasta atau yang lain-lain.

b. Public Share of Demand Deposit

Public Share of Demand Deposit atau Saham publik terhadap deposito unjuk, diartikan sebagai langkah instrumen kebijakan moneter dengan menganjurkan adanya mobilisasi dana dari bank komersil yang terkumpul dalam deposito untuk dialirkan kepada pemerintah, sehingga pemerintah memiliki pendapatan lain selain pajak yang akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek kesejahteraan social, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan optimalisasi *output* (GDP) dan stabilisasi harga.

c. Statutory Reserve Requirement

Bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. Hal ini kan membantu memberikan jaminan atas deposit dan sekaligus akan membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank. Sebaliknya bank sentral harus mengganti biaya yang dikeluarkan untuk mobilisasi dana yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial ini.

Dana yang diterima oleh bank sentral melalui statutory reserve requirement dapat digunakan untuk dua tujuan. Sebagian dana, jelas, harus digunakan kembali

sebagai cadangan terakhir bagi pemberi pinjaman. Sebagiaman telah ditunjukkan sebelumnya, bank-bank komersial sebelumnya, bank-bank komersial Islam dengan sumber keuangan yang banyak dipergunakan dengan kerjasama bagi hasil sulit melakukan prediksi atas keuangannya dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Disini, meskipun sudah ada pengaturan sebelumnya, mungkin sekali masih ada waktu-waktu tertentu bank-bank Islam membutuhkan bantuan

bank sentral. Untuk itu bank sentral dapat meningkatkan cadangan yang ada melalui pool cadangan dengan jumlah bank yang ada. Dalam keadaan krisis bank sentral dapat saja melampaui batas yang telah ditetapkan dengan konsekuensi ada penalti yang memadai, perhatian dan langkah-langkah pembaharuan.

d. Credit Ceillings (Pembatasann Kredit)

Perangkat perbankan yang disebutkan di atas dapat membantu bank sentral untuk melakukan ekspansi dalam high power money, pengembangan kredit masih dapat melampaui batasan yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh, *Pertama*, tidaklah mungkin menentukan secara akurat arus dana ke dalam sistem perbankan, kecuali yang disediakan melalui pinjaman *mudharabah* oleh bank sentral, terutama di kalangan masyarakat umat islam yang pasar uangnya belum memadai. Kedua, hubungan antar cadngan bank cadangan bank dan komersial dan perkembangan kredit juga tidak persis.

Kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan kompetisi yang sehat antar bank.

e. Alokasi Kredit Berdasarkan Nilai.

Realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi kredit mengarah pada optimisasi produksi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu adanya jaminan kredit yang disepakati oleh pemerintah dan bank-bank komersial untuk mengurangi resiko dan biaya yang ditanggung oleh bank.

f. Teknik lain

Teknik kaulitatif dan kuantitatif diatas harus dilengkapi dengan senjata-senjata lain untuk merealisasikan sasaran yang diperlukan termasuk diantaranya *moral suasion* atau himbauan moral.

Dari literatur perbankan Islam, berikut adalah alternatif instrumen kebijakan yang dapat dipakai oleh bank sentral:⁴

a. Reserve Ratio

Adalah suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5 %. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan *reserve ratio* misalnya dari 5 persen menjadi 20 %, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.

b. Lending Ratio

Dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah *Lending* (meminjamkan), lending ratio dalam hal ini berarti *Qardhul Hasan* (pinjaman kebaikan).

c. Refinance Ratio

Adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika *refinance ratio* meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika *refinance ratio* turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman.

⁴ Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, h. 48

d. *Profit Sharing Ratio*

Ratio bagi keuntungan (*profit sharing ratio*) harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan *profit sharing ratio* sebagai instrumen moneter, dimana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka *ratio* keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan.

e. *Islamic Sukuk*

Adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar.

Ada juga penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial, disebut sebagai *Treasury Bills*. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. *Treasury Bills* ini tidak dapat diterima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga yaitu disebut GIC: *Government Instrument Certificate*

Saat ini terdapat beberapa bank sentral, baik yang menggunakan *single banking* (bank Islam saja) maupun *dual banking system* yang telah menciptakan dan menggunakan instrumen pengendalian moneter ataupun menggunakan surat berharga dengan *underlying* pada transaksi-transaksi syariah. Prinsip transaksi syariah yang digunakan antara lain adalah Wadiah, Musyarakah, Mudharabah, Ar-Rahn, maupun Al-Ijarah.

Tabel.2. Studi Alternatif-kritis Terhadap Instrumen Kebijakan Moneter Konvensional dalam Pemikiran Umer Chapra

Instrumen Kebijakan Moneter Konvensional	Instrumen Kebijakan Moneter Islam
Operasi Pasar terbuka	Target pertumbuhan M dan M0
Fasilitas Diskonto	Saham publik terhadap deposito unjuk
Rasio Cadangan Wajib	Cadangan wajib resmi
Imbauan Moral	Pembatasan kredit
	Alokasi kredit yang berorientasi pada nilai
	Tekhnik Lain; <i>Moral suasion, OMO (SUKUK), refinance ratio, rasio peminjaman</i>

Sumber: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia April 2010

D. Relevansi Antara Kebijakan Moneter M. Umer Chapra dengan Kebijakan Moneter dalam Konteks Keindonesiaan

Secara prinsip tujuan dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islam menurut M. Umer Chapra berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return* (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya.

Dalam sistem kebijakan moneter Indonesia yang telah menerapkan sistem moneter ganda semua instrumen diatas telah dilaksanakan dalam penerapannya,

hal ini seiring dikeluarkannya UU Bank Indonesia No.23 tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No.3 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia telah di beri amanah sebagai otoritas moneter ganda yang dapat menjalankan kebijakan moneter konvensional maupun syariah. Karena di Indonesia masih menggunakan sistem moneter dan perbankan ganda, maka yang menjadi perbedaan utama antara sistem moneter Islam dan konvensional adalah adanya konsep bagi hasil dalam Islam yang meniadakan bunga.